

Variabel-variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008

Oleh: Doni Hendrik

ABSTRACT

As a capital city of West Sumatra Province, Padang has run its first district election for mayor in 2008. Based on statistical count, the vote of "Pilkada" Padang in the election is just 51%. That is new record in Indonesian political history, because citizen political participation always more than 75% in the past. Because of that, the main question revealed in this study is what variables has influenced the lack of participation in Padang "Pilkada" in 2008? To find the answer, a study has been conducted. This study use the quantitative and descriptive method. Political participation theory has been used to explain the problems. This study found that the lack of socialization of Pilkada by KPU and the lack of Political Consciousness of Padang citizen has become variables that influence the turn out of the vote in Padang Pilkada in 2008.

Kata Kunci: Partisipasi politik, penurunan suara, kesadaran politik, sosialisasi politik

I. PENDAHULUAN

Pemilu merupakan salah satu tonggak penting yang merepresentasikan kedaulatan rakyat, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada negara demokrasi tanpa memberikan peluang adanya pemilihan umum yang dilakukan secara sistematis dan berkala. Oleh karenanya pemilu digolongkan juga sebagai elemen terpenting dalam sistem demokrasi. Apabila suatu negara telah melaksanakan proses pemilu dengan baik, transparan, adil, teratur dan berkesinambungan, maka negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara yang tingkat kedemokratisannya baik, namun sebaliknya apabila suatu negara tidak melaksanakan pemilu atau tidak

mampu melaksanakan pemilunya dengan baik, dimana terjadinya berbagai kecurangan, deskriminasi, maka negara itu pula dinilai sebagai negara yang anti demokrasi.

Dalam sistem politik negara Indonesia, pemilu merupakan salah satu proses politik yang dilaksanakan setiap lima tahun, baik untuk memilih anggota legislatif, maupun untuk memilih anggota eksekutif. Anggota legislatif yang dipilih dalam pemilu lima tahun tersebut, terdiri dari anggota legislatif pusat/parlemen yang dalam ketatanegaraan Indonesia biasanya disebut sebagai DPR-RI, kemudian DPRD Daerah Pripinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sementara dalam konteks pemilu untuk

pemilihan eksekutif, rakyat telah diberi peluang untuk memilih President, Gubernur dan Bupati/Walikota. Besarnya hak rakyat untuk menentukan para pemimpin dalam lembaga eksekutif dan legislatif pada saat ini tidak terlepas dari perubahan dan reformasi politik yang telah bergulir di negara ini sejak tahun 1998, dimana pada masa-masa sebelumnya hak-hak politik masyarakat sering didiskriminasi dan digunakan untuk kepentingan politik penguasa saja dengan cara mobilisasi, namun rakyat sendiri tidak diberikan hak politik yang sepenuhnya untuk menyeleksi para pemimpin, mengkritisi kebijakan, dan proses dialogis yang kritis, sehingga masyarakat dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan-kepentingannya.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melalui amandemen pertama hingga ketiga pada tahun 2002, telah memberi peluang pemberian hak politik masyarakat untuk memilih presiden secara langsung, dimana sebelumnya presiden hanya dipilih oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara ini. Namun perubahan konstitusi telah merubah pula kelembagaan politik negara ini. Perubahan yang terjadi mengikut kepada undang-undang dasar tersebut juga terjadi pada pemilihan kepala daerah. Dengan lahirnya Undang-undang No. 32 Tahun 2004, maka undang-undang tersebut telah memberikan hak politik rakyat untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota secara langsung. Dengan demikian hak politik masyarakat untuk melakukan partisipasi politik secara konvensional terbuka lebar.

Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Ia memiliki makna yang sangat penting dalam bergeraknya roda dan sistem demokrasi. Apabila masyarakat, memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik akan berjalan dengan baik, sehingga akan sangat berarti pula terhadap perkembangan bangsa dan negara ini. Sebaliknya partisipasi politik juga tidak akan bermakna apa-apa dan tidak berarti sama sekali kalau ia tidak memenuhi syarat dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Oleh karenanya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah merupakan hal yang sangat penting pula untuk ditilik, karena rendah atau tingginya suatu partisipasi merupakan sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses demokrasi dan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat.

Pilkada secara langsung di Sumatera Barat pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005 yaitu dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sedangkan kota Padang yang merupakan pusat pemerintahan di provinsi ini baru pada tahun 2008 melaksanakan Pilkada secara langsung untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karena pemilihan kepala daerah di kota Padang merupakan yang pertama kali dilakukan di kota ini, maka hal ini merupakan tonggak sejarah pertama pula bagi rakyat untuk mengejawantahkan kedaulatannya di kota Padang.

Proses politik yang penting di kota Padang yang semula diharapkan mendapat dukungan partisipasi politik masyarakat yang tinggi dan berkualitas ini, malah pada kenyataannya hanya menunjukkan angka 51 % saja yang berpartisipasi ikut mencoblos dalam pilkada. Apabila ditilik kembali pada proses yang terjadi sebelum ini di Sumatera Barat, rendahnya partisipasi masyarakat kota Padang dalam ikut serta memilih di TPS-TPS ini, ternyata bukanlah fenomena pertama dan tunggal di Sumatera Barat, karena sejak pemilihan legislatif tahun 2004, masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada tahun itu mencapai 30 %. Kemudian fenomena rendahnya partisipasi politik ini juga berlanjut pada pemilihan langsung Presiden tahun 2004, dimana masyarakat kota Padang yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 40 %. Bahkan pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat pada tahun 2005, tingkat partisipasi masyarakat yang ikut mencoblos hanyalah 52 % saja. Hal ini berarti bahwa masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 48%.

Realitas dan fenomena rendahnya partisipasi politik ini merupakan hal yang sangat memprihatinkan, kerana hak politik merupakan salah satu hak azazi. Namun masyarakat yang telah diberi hak pilihnya tersebut justru tidak mau menggunakan hak pilihnya. Padahal partisipasi politik masyarakat diharapkan setidaknya mencapai 70%, karena dengan tingkat seperti itu, maka kita dapat mengatakan tingkat partisipasi politik dalam pemilihan umum sudah tinggi, sehingga legitimasi pemerintahan bisa

diperoleh dengan kuat. Namun sebaliknya apabila partisipasi politik yang ikut memilih dalam pemilu rendah, maka legitimasi pemerintahan pun bisa dikatakan lemah.

Fenomena demikian menimbulkan masalah dan pertanyaan bagi kita, mengapa masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya? Faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Tahun 2008?

Rangkaian fenomena rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya di Kota Padang, rendahnya keikutsertaan masyarakat Padang dalam mencoblos dalam pemilu Kepala Daerah Wali Kota Padang tahun 2008 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya memunculkan pertanyaan akademis yang perlu dijawab dalam penelitian ini ,yaitu faktor-faktor apa yang menyebabkan rendahnya penggunaan hak pilih masyarakat (*Turn Vote Out*) dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2008? Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan variabel-variabel penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Kota Padang tahun 2008. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi proses penyelenggaraan pemilu pilkada Kota Padang, sehingga dapat dimanfaatkan oleh KPUD dan pemerintah maupun partai politik serta masyarakat lainnya dalam konteks upaya peningkatan partisipasi politik dimasa depan.

II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Teori Partisipasi Politik

Partisipasi secara harfiah berarti keikutsertaan. Dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Partisipasi politik dapat juga difahami sebagai proses keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

Menurut Ramlan Surbakti¹, partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Sementara Michael Rush dan Philip Althof menjelaskan partisipasi politik sebagai usaha terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum².

Berbeda dengan pendapat-pendapat terdahulu, Sudijono Sastroatmodjo³ mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara efektif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Sedangkan menurut Samuel P. Huntington partisipasi politik juga mencakup

semua kegiatan yang mempengaruhi pemerintah, terlepas tindakan itu efektif atau tidak, berhasil atau gagal. Pengertian lainnya adalah partisipasi politik berupa kegiatan mempengaruhi pemerintah yang dilakukan langsung atau tidak: langsung berarti dia melakukan sendiri tanpa menggunakan perantara, tetapi ada pula yang tidak langsung melalui orang-orang yang dianggap dapat menyalurkan pemerintah⁴.

Ramlan Surbakti⁵ mengelompokkan partisipasi politik menjadi dua yaitu:

1. Partisipasi aktif

Adalah kegiatan yang berorientasi pada proses *input* dan *output* politik. Yang termasuk pada partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan.

2. Partisipasi pasif

Adalah kegiatan yang berorientasi pada proses *output*. Kegiatan yang termasuk pada partisipasi pasif adalah kegiatan yang mentaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah⁶.

Partisipasi kolektif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi kolektif yang konvensional dan partisipasi kolektif non konvensional. Bentuk partisipasi politik konven-

¹ Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia

² Rush, Michael & Althof. 2000. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Press.

³ Sudijono Sastroatmodjo. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press

⁴ Huntington, Samuel P dan Nelson, Joan. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Renika Cipta

⁵ Ramlan Surbakti, *op cit*.

⁶ *Ibid*

sional adalah pemberian suara, aktivitas diskusi politik, kegiatan kampanye, aktivitas membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan lain, dan komunikasi individu dengan pejabat politik⁷.

Dari beberapa definisi partisipasi politik, yang digunakan dalam penelitian ini ialah definisi Gabriel Almond yaitu, bentuk partisipasi konvensional berupa pemberian suara, kegiatan kampanye, aktivitas membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan lain. Hal ini dikarenakan teori ini saya rasa yang paling cocok digunakan, karena untuk mengukur partisipasi politik masyarakat di Kota Padang yang budaya politiknya masih berada pada posisi subjektif, maka hal yang paling operasional baru pada pengukuran partisipasi politik konvensional dalam pemberian suara pada Pemilu/Pilkada.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik

Partisipasi politik di negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi merupakan hak warga negara, tapi tidak semua warga negara berperan serta dalam proses politik. Menurut pendapat beberapa ahli beberapa faktor yang menyebabkan orang mau atau tidak mau ikut berpartisipasi dalam politik antara lain:

1. Status sosial dan ekonomi

Status sosial ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan.

Sedangkan status ekonomi ialah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik⁸.

2. Situasi

Menurut Ramlan Surbakti, situasi politik juga dipengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung seperti cuaca, keluarga, kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman⁹.

3. Afiliasi politik orang tua

Afiliasi berarti tergabung dalam suatu kelompok atau kumpulan. Afiliasi politik dapat dirumuskan sebagai keanggotaan atau kerjasama yang dilakukan individu atau kelompok yang terlibat ke dalam aliran-aliran politik tertentu. Afiliasi politik mendorong tumbuhnya kesadaran dan kedewasaan politik masyarakat untuk menggunakan hak politiknya secara bebas dan bertanggungjawab dalam melakukan berbagai aktifitas politik, seperti ikut dalam partai politik dalam pemerintahan, ikut dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan politik¹⁰.

4. Pengalaman berorganisasi

Organisasi merupakan suatu sistem yang mengatur kehidupan masyarakat atau bisa diartikan sebagai suatu perilaku yang terpola dengan memberikan jabatan pada orang-

⁸ Ramlan Surbakti, *op cit*.

⁹ *Ibid*

¹⁰ B.N. Marbun. 1996. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

⁷ Almond dalam Mochtar Masoed. 2001. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

orang tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu demi pencapaian tujuan bersama¹¹. Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Ibnu Kencana¹² partisipasi politik merupakan penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi serta ambil bagian dalam sikap pertanggung jawaban bersama baik dalam situasi politik yang melibatkan dukungan.

5. Kesadaran politik

Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang menyangkut tentang pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup.

6. Kepercayaan terhadap pemerintah

Kepercayaan terhadap pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak, baik dalam pembuatan kebijakan-kebijakan atau pelaksanaan pemerintahan.

7. Perangsang partisipasi melalui sosialisasi media massa dan diskusi-diskusi informal.

Dari beberapa pendapat diatas, penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan variabel kesadaran politik dan variabel situasi yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, dalam pemilihan wali kota Padang tahun 2008

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survey dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian survey dipakai untuk mengumpulkan data secara langsung karena yang menjadi populasi sangat besar untuk diobservasi secara langsung. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif

Penelitian ini berlokasi di Kota Padang pada beberapa daerah pemilihan per kecamatan yang ada di kota Padang. Populasi dalam penelitian ini adalah semua orang yang memenuhi syarat untuk memilih pada pemilihan Walikota Padang. Mengingat cukup banyaknya populasi yang memenuhi syarat untuk melakukan pemilihan walikota maka ditentukanlah jumlah sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus Frank Lynck. Dari perkalian dengan menggunakan rumus ini, maka diperoleh dan dikenakan jumlah sampel (N) sebanyak 100 orang. Responden dalam penelitian ini dipilih secara *systematic sampling*. Teknik ini diterapkan karena populasi yang tersebar di setiap kecamatan mempunyai sebuah kerangka sampel yang didasarkan pada daftar pemilih tetap pemilihan wali kota

Dalam menganalisis data penelitian ini proses awal menganalisa data dilakukan dengan

¹¹Bonar Simangunsong. 2004. *Negara. Demokrasi dan Berpolitik Yang Profesional*. Jakarta : Gramedia

¹² Ibnu Kencana. 1997. *Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta

menyusun secara sistematis data mentah (yang ada dalam kuisioner) dengan kode angka yang telah dibuat, kemudian dilanjutkan pemindahan data ke komputer dengan menggunakan analisis statistik dengan program komputer “*Statistical Package For Social Science 15.0*” atau SPSS 15.0. Analisis terhadap hasil pengolahan data (*data ouput*) berbentuk analisis deskriptif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Variabel Kesadaran Politik

Dari hasil wawancara responden diperoleh bahwa 33% responden cukup mengetahui adanya Pilkada Tahun 2008, 29% mengetahui, 17% sangat mengetahui, dan 21% tidak mengetahui Pilkada Kota Padang. Hal ini bermakna tingkat pengetahuan responden tentang adanya Pilkada ialah tinggi yaitu berkisar 50%. Begitu pula pengetahuan hak warga negara dalam Pilkada menunjukkan bahwa 62% responden mengetahui dan merasa berhak berpartisipasi dalam pilkada, 35% nya mengaku sangat berhak, hanya 3 % saja yang merasa tidak dan cukup berhak. Hal ini bermakna tingkat pengetahuan akan hak warga negara ialah sangat tinggi. Begitu juga ketika ditanya tentang sikap responden terhadap tidak terdaftarnya responden dalam daftar pemilih sementara, maka 35% menjawab akan mengurus dengan sadar, 28% mengurus kalau petugas datang, 21% kesadaran sendiri akan mengurusnya, dan hanya 3% yang tidak mau peduli.

Dari wawancara didapatkan bahwa rseponden mengaku yang memahami pentingnya partisipasi

dalam pilkada ialah 47%, 25% cukup faham, 14% sangat faham, 10% kurang faham dan hanya 4% yang tidak faham. Hal ini bermakna bahwa tingkat kefahaman masyarakat Kota Padang tentang pentingnya partisipasi dalam pilkada ialah tinggi. Seterusnya didapatkan pula bahwa 37% responden mengaku bahwa ia faham konsekuensinya jika tidak ikut memilih dalam pilkada, 27% cukup faham, 3% kurang faham, 11% sangat faham, dan 12% responden mengaku tidak faham. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat tentang dampak tidak ikut serta dalam pilkada sudah tinggi/baik.

Ketika ditanya tentang pentingnya pilkada 59% responden mengaku penting, 26% merngaku sangat penting, 11% merasa cukup penting, 3% mengaku tidak penting dan hanya 1% yang mengaku kurang penting suatu pilkada. Untuk frekuensi pencarian informasi tentang pilkada oleh responden diperoleh bahwa 37% mengaku cukup sering, 27%jarang sekali, 17% sering, 15% tidak pernah dan hanya 4% yang sangat sering. Hal ini bermakna bahwa taraf keinginan masyarakat mencari informasi sudah mulai baik.

Responden juga mengaku bahawa hanya 10% saja yang merasa sangat mengetahui kandidat dan latar belakangnya, 15% ragu-ragu, 23% kurang mengetahui dan 41% yang sederhana atau cukup mengetahui.

Ketika ditanya pengetahuan responden tentang hari H pemungutan suara dalam Pilkada Kota Padang 2008, 51% cukup mengetahui, 21% sangat mengetahui, 17% kurang mengetahui, 9% tidak mengetahui. Hal ini berarti bahwa tingkat ketahuan responden tentang hari H ialah tinggi.

Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa pada umumnya responden sudah memahami waktu dan tata cara pemungutan suara

Variabel Sosialisasi Politik Oleh KPUD

Dari hasil penelitian didapatkan gambaran bahwa menurut masyarakat KPUD memiliki frekuensi sosialisasi yang sangat jarang, dimana 80% responden mengaku bahwa KPUD jarang dan tidak pernah melakukan sosialisasi. Sosialisasi tentang hak masyarakat yang dilakukan oleh KPUD juga senada dengan temuan sebelumnya, dimana 78% responden mengaku tidak pernah dan jarang sekali mendapat sosialisasi hak warga.

Dari sisi sosialisasi mengenai pelaksanaan hari H pilkada, temuan penelitian ini menunjukkan rendahnya kegiatan sosialisasi mengenai hari H oleh KPUD, sehingga masyarakat tidak tahu pelaksanaan hari H pilkada. Mengenai sosialisasi tata cara pemungutan suara dalam pilkada, hasil penelitian ini pun menunjukkan bahwa proses pemungutan suara dalam pilkada pun menunjukkan bahwa proses tersebut 72% jarang dan tidak pernah dilakukan oleh KPUD. Hanya 28% saja orang yang mengaku pernah mendapatkan sosialisasi yang cukup.

Sosialisasi oleh KPUD tentang nama-nama calon yang akan maju dalam pilkada pun menurut pengakuan responden 72% tidak pernah, dan hanya 28% saja yang pernah dan sering. (lihat Tabel 20)

Sosialisasi yang minim oleh KPU juga terlihat dari rendahnya sosialisasi mengenai tata cara pendaftaran ulang bagi masyarakat yang belum tercantum namanya

dalam daftar pemilih sementara, dimana hanya 21% saja masyarakat yang pernah diberitahukan mengenai tatacara pendaftaran ulang tersebut, sedangkan 79% nya lagi dari responden mengaku tidak pernah atau jarang mendapatkan sosialisasi tata cara pendaftaran ulang apabila namanya tidak tercantum dalam daftar pemilih sementara.

Sejalan dengan hal tersebut, sosialisasi tentang latar belakang calon pun sangat minim, dimana hanya 24% saja responden yang pernah mendapatkan sosialisasi, sementara 86% lagi tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai latar belakang kandidat atau calon Walikota dan Wakil walikota Padang tahun 2008. Sementara itu, dari rangkaian minimnya sosialisasi oleh KPUD kota Padang kepada masyarakat, maka dapat difahami pula bahwa 64% responden menilai bahwa kinerja KPUD Padang tidak baik atau berkinerja buruk. Hanya 24% saja yang menilai baik, sedangkan 12%nya menilai cukup.

Variabel Situasi

Setelah dilakukan wawancara secara umum diperoleh informasi bahwa situasi dan cuaca pada hari H Pilkada ialah baik sehingga Pilkada dapat berjalan dengan lancar. Hal tersebut terlihat dari pengakuan responden, dimana 82% responden mengaku cuaca pada hari H berada keadaan baik, dan hanya 8% saja yang mengaku cuaca tidak baik/kurang baik. Dalam konteks situasi kesehatan, 87% responden mengaku bahwa kesehatannya baik dan sangat baik, dan hanya 8% saja yang merasa kurang baik/tidak baik. Sementara itu,

dari segi situasi keamanan, 87% responden mengaku bahwa keadaan pada hari H ialah sangat aman/aman dan hanya 3 % saja yang merasa kurang aman/tidak aman.

Penelitian ini juga menemukan bahwa 94% responden mengaku tidak pernah mendapatkan ancaman dalam bentuk apapun dalam proses pilkada Kota Padang 2008. Hanya 3 % yang sangat sering mendapatkan ancaman. Sedangkan 3% lagi pernah merasa diancam dalam proses pilkada.

Selanjutnya, dari 100 responden, 6% mengaku bahwa ada urusan yang sangat penting berbanding pilkada, 12% mengaku memiliki urusan penting, dan 10% merasa cukup penting kegiatannya berbanding pilkada. Sedangkan 72% mengaku bahwa responden tidak memiliki urusan yang penting berbanding pilkada. Temuan penelitian ini juga mengungkapkan bahwa ketika ditanya tentang alasan responden tidak datang ke TPS untuk mencontreang dalam Pilkada, didapatkan jawaban, dimana 11% mengaku bahwa pilkada kurang penting, 16% mengaku karena alasan bahwa pilkada tidak akan merubah hal ke arah positif, 30% mengaku karena tidak mendapatkan sosialisasi, 3% karena pergi liburan, 6% karena situasi, dan 34% karena alasan-alasan lain sehingga tidak ikut mencontrenag dalam pilkada Kota Padang tahun 2008.

Tingkat Rata-rata Variabel

Dari perhitungan skor seluruh item variabel kesadaran politik warga Padang terhadap Pilkada ialah berada pada taraf sedang (skor 2,52) sehingga boleh diartikan bahwa tingkat kesadaran politik masyarakat Padang terhadap Pilkada tahun 2008

berada pada tingkatan. Sedangkan yang berdekatan cenderung mendekati rendah. Dari temuan penelitian juga terungkap bahwa masalah yang terendah atau masalah utama yang dianggap responden dalam pilkada ialah kurangnya rasa hak warga untuk ikut serta dalam pilkada. Selain daripada itu, responden menganggap tidak/kurang pentingnya pilkada.

Dari hasil pengskoringan item-item pertanyaan variabel sosialisasi oleh KPUD, maka didapatkan bahwa tingkat sosialisasi Pilkada menurut masyarakat sangat rendah. Sedangkan untuk variabel Situasi dari hasil pengskoran didapatkan bahwa rata-rata responden menyatakan situasi atau keadaan ialah sedang/cukup baik dimana nilai skornya ialah 2,49 (sedang). Dari hasil pengskoran didapatkan bahwa rata-rata responden menyatakan situasi atau keadaan ialah sedang/cukup baik ,dimana nilai skornya ialah 2,49 (sedang). Hal ini bermakna bahwa variabel situasi atau keadaan dianggap biasa-biasa saja oleh masyarakat. Namun apabila didalami lebih lanjut ternyata banyak juga yang memanfaatkan keadaan libur yang bersambung dengan hari libur akhir minggu, sehingga banyak pula memanfaatkan untuk pergi liburan atau berwisata atau bersirahturahim dengan keluarga di kampungnya masing-masing.

Pembahasan Hasil Penelitian

Dari deskripsi data-data kuantitatif deskriptif tersebut ditemukan bahwa variabel yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik masyarakat kota Padang dalam Pilkada Kota Padang tahun 2008 ialah disebabkan oleh kurangnya sosialisasi

dan cenderung lemahnya kesadaran politik warga kota Padang. Sementara situasi pada hari H menunjukkan situasi yang biasa-biasa saja/baik-baik saja. Hal ini berarti bahwa variabel situasi dapat dikatakan tidak berpengaruh terhadap rendahnya tingkat partisipasi.

Walaupun demikian, data deskriptif juga menunjukkan alasan lain ketidak-ikutan masyarakat dalam pilkada ini disebabkan oleh alasan-alasan lain. Peneliti kemudian melakukan pendalaman melalui wawancara kualitatif. Setelah didalami lebih lanjut melalui wawancara dengan pertanyaan terbuka, maka alasan lain-lain yang dimaksud responden ialah oleh karena beberapa alasan yang pada umumnya terpolakan karena alasan: tidak dososialisasikan, karena tidak terdaftar dalam DPT, serta tidak mau peduli dengan Pilkada. Hal ini menunjukkan, bahwa persoalan rendahnya partisipasi yang muncul tersebut disebabkan oleh masalah-masalah yang serupa dari data kuantitatif deskriptif sebelumnya, dimana pada dasarnya berhubungan dengan rendahnya kinerja KPUD dan Pemerintah daerah, sosialisasi politik dan penyadaran politik, serta proses pembuatan DPT yang mengalami berbagai permasalahan. Hal ini membuat banyak masyarakat yang tidak tercatat dalam DPT Pilkada Kota Padang Tahun 2008.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis data tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa rendahnya sosialisasi politik merupakan variabel yang kuantitas pelaksanaannya terkecil dilakukan oleh

KPUD kota Padang. Sementara kesadaran politik, merupakan variabel yang berada pada posisi sedang tetapi cenderung mendekati lemah. Sementara variabel situasi politik merupakan variabel yang berada pada taraf yang sedang yang tidak memiliki pengaruh terhadap rendahnya partisipasi politik. Dengan demikian, maka variabel sosialisasi politik yang rendah merupakan variabel yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pilkada kota Padang tahun 2008.

Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian ini maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Rendahnya partisipasi politik dalam pemilu khususnya dalam pilkada dapat mengancam jalannya demokrasi diarah lokal. Karena hal tersebut memperlemah atau mengurangi tingkat legitimasi atau mandat rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Oleh sebab itu diperlukan usaha sungguh-sungguh dan sistematis oleh pemerintah dan *stakeholder* untuk melakukan usaha peningkatan partisipasi dengan jalan meningkatkan kesadaran politik warga, meningkatkan sosialisasi KPU dan pemerintah, serta memperbaiki situasi dan keadaan kearah yang lebih baik sehingga masyarakat memiliki kepedulian atau kesadaran serta tidak memunculkan sikap apatis terhadap proses-proses politik.
2. Perlu adanya penelitian lanjutan tentang fenomena menurunnya partisipasi politik di berbagai pemilu di Indonesia, baik Pilkada

Legislatif maupun Presiden, pilkada Sumbar tahun 2010 ini termasuk menurunnya partisipasi

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- B.N. Marbun. 1996. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Bonar Simangunsong. 2004. *Negara. Demokrasi dan Berpolitik Yang Profesional*. Jakarta : Gramedia
- Huntington, Samuel P dan Nelson, Joan. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Renika Cipta
- Ibnu Kencana. 1997. *Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mochtar Masoed. 2001. *Perbandingan Sistem Politik*. Jogjakarta: Gajah Mada University Press
- Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Rush, Michael & Althof. 2000. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudijono Sastroatmodjo. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press

